

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Timor-Leste merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik demokratis yang berlandaskan konstitusi 2002. Tata kelola pemerintahan dijalankan dengan prinsip demokrasi konstitusional, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas pembangunan nasional. Kebijakan sosial ini diwujudkan melalui sekolah gratis, layanan kesehatan tanpa biaya, serta tunjangan lansia, yang mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan sosial tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah pusat, melainkan juga pada kemampuan negara mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi pendekatan penting yang diadopsi Timor-Leste untuk memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat diakses secara merata hingga ke wilayah pedesaan. Desentralisasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, sehingga warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

*Decree-Law* No. 2/2003 tentang Transportasi Jalan menetapkan kerangka hukum dasar bagi pembangunan, pengelolaan, dan pengaturan transportasi darat. Peraturan ini menjadi fondasi hukum bagi pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di Timor-Leste. Sementara itu, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 memperkuat aspek desentralisasi dengan menambahkan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat, penyelenggaraan jalan khusus, serta mekanisme data, dan informasi jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal. Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan proyek jalan yang dibahas dalam *meeting suco* sering menghadapi berbagai kendala,

seperti keterbatasan anggaran, minimnya kapasitas teknis, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan. Akibatnya, pelaksanaan proyek di lapangan kerap tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga kualitas pembangunan jalan masih belum berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menekankan partisipasi masyarakat dengan realitas implementasi di tingkat lokal.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, desentralisasi menjadi pendekatan penting yang diadopsi Timor-Leste. Melalui desentralisasi, pelayanan publik diupayakan lebih dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses. Desentralisasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial, memperluas jangkauan layanan dasar, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Efektivitas kebijakan sosial di Timor-Leste tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui desentralisasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat diakses secara merata hingga ke wilayah pedesaan. Desentralisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam kerangka demokrasi partisipatif, desentralisasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa layanan publik benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Penyediaan layanan publik yang berbasis desentralisasi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan sosial seperti pendidikan gratis, layanan

kesehatan tanpa biaya, dan tunjangan lansia menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjamin distribusi layanan yang adil, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong masyarakat berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Dengan demikian, desentralisasi di Timor-Leste tidak hanya berfungsi sebagai strategi administratif, tetapi juga sebagai fondasi bagi penguatan demokrasi dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan nasional dan kebutuhan lokal, serta memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan desentralisasi diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Prinsip dasar desentralisasi menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif apabila dilakukan di tingkat daerah yang lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dalam konteks ini, penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi desentralisasi dan partisipasi masyarakat pada penyediaan layanan publik lokal di *Município* Ermera, salah satu wilayah pegunungan di Timor-Leste yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Dimensi strategis desentralisasi dan partisipasi terletak pada penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Layanan publik seperti jalan, penyediaan air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang responsif sering menjadi indikator utama efektivitas desentralisasi. Idealnya, desentralisasi memperkuat kapasitas daerah, partisipasi warga berfungsi sebagai instrumen kontrol, dan layanan publik menjadi *output* nyata yang dirasakan masyarakat. Namun pada kenyataannya, ketiga aspek tersebut belum berjalan seimbang di banyak daerah, termasuk Ermera.

Dalam praktik, pelimpahan kewenangan sering tidak diimbangi dengan kapasitas birokrasi lokal yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pengelolaan anggaran yang belum optimal menjadi kendala utama. Selain itu, partisipasi masyarakat masih sering formalistik, sebatas kehadiran dalam musyawarah tanpa mempengaruhi pengambilan keputusan. Penyediaan layanan publik, khususnya infrastruktur jalan, masih terkendala keterbatasan dana, rendahnya transparansi, serta kualitas pembangunan yang belum berkelanjutan.

Bagi negara berkembang seperti Timor-Leste, pembangunan jalan merupakan prioritas nasional yang vital. Ermera sebagai sentra produksi kopi terbesar di Timor-Leste sangat bergantung pada jaringan jalan untuk distribusi hasil pertanian. Namun banyak ruas jalan rusak parah terutama pada musim hujan ketika akses transportasi terhambat oleh longsor dan jalan berlumpur. Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi, terbatasnya akses pendidikan, dan keterlambatan layanan kesehatan darurat. Infrastruktur jalan menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan penentu aksesibilitas wilayah, sehingga respon pemerintah terhadap kebutuhan ini menjadi ukuran utama keberhasilan desentralisasi.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas desentralisasi dan partisipasi warga negara dengan realitas penyediaan layanan publik di lapangan. Idealnya, desentralisasi mampu memperkuat kapasitas daerah, partisipasi warga menjadi instrumen kontrol dan masukan, dan layanan publik lokal menjadi hasil nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Namun kenyataannya, ketiga aspek tersebut belum berjalan seimbang.

Salah satu bentuk layanan publik, infrastruktur jalan menempati posisi yang sangat strategis bahwa jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian daerah, memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat integrasi sosial-ekonomi antar wilayah. Berkaitan dengan sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah Timor Leste berupaya memperkuat kewenangan pemerintah daerah (*municipal*) dalam penyelenggaraan layanan publik.

Secara teoritis, Rondinelli (1981) dan Blair (2000) menegaskan bahwa desentralisasi diharapkan meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperluas ruang partisipasi warga. Rondinelli (1981) menjelaskan desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan melalui dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Arnstein (1969) melalui *ladder of participation* menunjukkan tingkat kekuatan masyarakat dalam proses pembangunan, dari *tokenism* hingga *citizen power*. Cohen dan Uphoff (1990) menekankan pentingnya partisipasi pada empat tahap mulai perencanaan hingga evaluasi. Kerangka teori ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi warga dan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik lokal.

Kontradiksi dengan kenyataan penelitian di lapangan bahwa kewenangan *Presidente Autoridade Municipal* (PAM) sebagai institusi lokal baru memiliki kewenangan administratif yang terbatas, sementara kewenangan fiskal dan teknis sebagian besar tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara terpusat, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, minimnya koordinasi antara pusat dan lokal, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal, secara bersama-sama menjadi tantangan utama dalam penyediaan layanan publik lokal.

Mekanisme pembangunan berbasis komunitas melalui *Programa Nacional Desenvolvimento Suco (PNDS)* telah membuka ruang partisipasi warga dalam proyek pembangunan melalui kontribusi tenaga, material, maupun ide-ide untuk perencanaan. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat sering kali masih terbatas pada tahap pelaksanaan proyek, sedangkan menurut Arnstein, 1969; Gaventa, 2004 “Dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan, masih minim belum terakomodasi secara optimal. Hal ini menyebabkan kualitas serta keberlanjutan pembangunan jalan sering menghadapi kendala serius, seperti kurangnya perawatan, tidak tepatnya prioritas pembangunan, dan lemahnya rasa memiliki dari masyarakat”.

Kondisi ini terlihat nyata di municipio Ermera, salah satu wilayah pegunungan di Timor-Leste yang menjadi sentral produksi pertanian,

khususnya kopi sebagai komoditas unggulan nasional. Topografi yang berbukit dan curah hujan yang tinggi membuat infrastruktur jalan di Ermera sering kali mengalami kerusakan parah, terutama pada musim hujan ketika akses jalan menjadi licin, berlumpur, bahkan terputus akibat longsor. Situasi ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk, tetapi juga berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian ke pasar, akses anak-anak ke sekolah, serta mobilitas masyarakat menuju fasilitas kesehatan.

Masyarakat di Ermera kerap menyuarakan keluhan dan protes terhadap kondisi jalan yang rusak, namun perbaikan infrastruktur tidak selalu sejalan dengan kebutuhan mendesak mereka. Banyak proyek pembangunan jalan bersifat sementara tanpa jaminan pemeliharaan berkelanjutan. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa aspirasi warga belum sepenuhnya diakomodasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip desentralisasi yang menekankan partisipasi dan akuntabilitas lokal dengan realitas kapasitas kelembagaan pemerintah daerah (Smith, 1985; Rondinelli, 1999).

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan akademik sekaligus praktis mengenai sejauh mana pelibatan warga dalam pembangunan jalan dan penerapan kebijakan desentralisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik lokal di sektor infrastruktur jalan. Lebih jauh, perlu ditelaah pula bagaimana partisipasi warga negara dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik tersebut, terutama dalam konteks wilayah pegunungan seperti Ermera yang dihadapkan pada keterbatasan geografis, ekonomi, dan kelembagaan.

Sejauh ini, studi mengenai desentralisasi di Timor-Leste lebih menitikberatkan pada hubungan pusat–daerah atau aspek kelembagaan (misalnya Aragão, 2018; Lao & Alves, 2021). Namun, penelitian yang mengkaji secara spesifik hubungan antara desentralisasi, partisipasi warga, dan kualitas penyediaan layanan publik – terutama infrastruktur jalan di wilayah rural seperti Ermera – masih sangat terbatas. Kesenjangan ini penting diisi untuk memahami bagaimana desain institusi dan kapasitas lokal mempengaruhi efektivitas layanan publik dan kualitas partisipasi warga pada konteks negara berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan hubungan antara desentralisasi, partisipasi warga, dan kualitas penyediaan layanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi empiris bagi literatur akademik dan rekomendasi praktis bagi reformasi kebijakan desentralisasi.

Kontribusi teoritis penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan perspektif baru terhadap hubungan antara desentralisasi dan partisipasi warga di negara berkembang. Temuan lapangan memperkuat kritik Arnstein (1969) bahwa partisipasi tidak dapat dipahami sebagai proses linier menuju *citizen power*, melainkan sebagai arena dinamis yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik, distribusi kewenangan antarlevel pemerintahan, kapasitas administratif lokal, serta relasi kekuasaan antaraktor pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model partisipasi yang lebih adaptif, bertahap, dan realistis, terutama untuk konteks lokal yang menghadapi keterbatasan kelembagaan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Studi kasus Ermera menunjukkan bahwa formalitas ruang partisipasi tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan substantif, sehingga pelimpahan kewenangan dalam desentralisasi perlu dipahami bukan hanya sebagai perubahan struktur administratif, tetapi juga sebagai proses negosiasi kekuasaan dan pembentukan kapasitas institusional di tingkat lokal. Perspektif ini memperluas literatur desentralisasi dengan menekankan pentingnya integrasi antara desain kelembagaan, transparansi informasi, dan mekanisme *community-based monitoring* sebagai prasyarat terwujudnya partisipasi bermakna.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara idealisme desentralisasi dengan praktik penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Di satu sisi, pemerintah telah menginisiasi kebijakan desentralisasi dan melaksanakan program pembangunan berbasis komunitas seperti *Programa Nacional Desenvolvimento Suco* (PNDS).

Namun di sisi lain, 1. Kewenangan pemerintah daerah masih terbatas, 2. Tingkat partisipasi masyarakat belum optimal, dan 3. Kualitas pembangunan infrastruktur jalan sering kali tidak berkelanjutan.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana desentralisasi dan partisipasi warga negara dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik lokal, khususnya infrastruktur jalan di Municipio Ermera.

Rumusan masalah ini disusun berdasarkan kerangka teoritik mengenai desentralisasi yang menekankan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk meningkatkan efektivitas layanan publik (Rondinelli, 1999), teori *participatory governance* yang menekankan pentingnya pelibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik (Fung & Wright, 2003), serta konsep *New Public Service* yang berorientasi pada pelayanan yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Ketiga perspektif ini menjadi dasar untuk menelaah hubungan antara kewenangan lokal, partisipasi warga negara, dan kualitas penyediaan layanan publik, khususnya di bidang infrastruktur jalan.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi di tingkat lokal dalam penyediaan layanan publik, khususnya pada infrastruktur jalan di *Municipio Ermera*?
2. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi warga negara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan ditingkat lokal?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan desentralisasi serta partisipasi warga dalam penyediaan infrastruktur jalan di Ermera?
4. Bagaimana kontribusi desentralisasi dan partisipasi warga terhadap peningkatan kualitas layanan publik lokal, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan desentralisasi memengaruhi kualitas penyediaan layanan publik lokal, khususnya pada infrastruktur jalan, serta menelaah sejauh mana partisipasi warga berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pelaksanaan desentralisasi, peran aktif masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik lokal. Fokus analisis diarahkan pada penggalan aspek-aspek pelimpahan kewenangan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mekanisme pengelolaan dan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan lokal dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara lebih spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi di tingkat lokal dalam penyediaan layanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan di municipio Ermera.
2. Mengidentifikasi dimensi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan di tingkat lokal.
3. Menelaah faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan desentralisasi serta partisipasi warga negara dalam penyediaan infrastruktur jalan di Ermera.
4. Menilai kontribusi desentralisasi dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik lokal, terutama dalam aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan desentralisasi dan partisipasi warga negara dalam penyediaan

layanan publik lokal, dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di *Município* Ermera, Timor-Leste. Penelitian ini tidak membahas seluruh layanan publik secara umum, tetapi secara spesifik diarahkan pada bagaimana kebijakan desentralisasi diterapkan di tingkat lokal dan bagaimana warga negara terlibat dalam proses pembangunan jalan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian, Tabel 1 disusun guna merinci ruang lingkup serta fokus utama kajian. Tabel ini menampilkan batasan penelitian yang ditetapkan, sekaligus menekankan aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian sehingga penelitian dapat berjalan terarah dan konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan.

**Tabel 1.** Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Fokus Penelitian
1	Menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi di tingkat lokal dalam penyediaan layanan publik, khususnya pada infrastruktur jalan di Município Ermera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk pelimpahan kewenangan kepada pemerintah lokal (municipal, administrative post, suco).</li> <li>- Kapasitas pemerintah lokal dalam mengelola pembangunan jalan.</li> <li>- Mekanisme koordinasi antar level pemerintahan dalam sektor infrastruktur jalan.</li> </ul>
2	Mengidentifikasi dimensi partisipasi warga negara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi dan praktik partisipasi warga di forum perencanaan (konsultasi, musyawarah desa/suco).</li> <li>- Keterlibatan warga dalam pelaksanaan proyek jalan.</li> <li>- Peran warga dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan jalan.</li> </ul>
3	Menelaah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor pendukung; <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelimpahan kewenangan dan dana ke tingkat suco yang</li> </ul> </li> </ul>

Sambungn tabel 1

No	Tujuan Penelitian	Fokus Penelitian
	desentralisasi serta partisipasi warga negara dalam penyediaan infrastruktur jalan..	<p>memberi ruang bagi masyarakat menentukan prioritas pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya gotong royong yang memperkuat partisipasi warga dalam pelaksanaan proyek.</li> <li>- Forum musyawarah suco sebagai wadah formal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan bersama.</li> <li>- Transparansi penggunaan dana <i>PNDS</i> yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.</li> <li>- Manfaat langsung yang dirasakan warga, seperti akses ke pasar, sekolah, dan layanan kesehatan.</li> </ul> <p>b. Faktor Penghambat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keterbatasan kapasitas teknis pemerintah suco dalam mengelola proyek dan dana secara profesional.</li> <li>- Dominasi elit lokal dalam proses musyawarah, yang berpotensi mengurangi inklusivitas partisipasi.</li> <li>- Kurangnya mekanisme pemeliharaan infrastruktur pasca-proyek, sehingga manfaat jalan tidak berkelanjutan.</li> <li>- Partisipasi kelompok rentan (perempuan, pemuda, masyarakat miskin) yang masih terbatas.</li> <li>- Koordinasi lemah antara <i>PNDS</i> di tingkat <i>suco</i> dengan rencana pembangunan</li> </ul>

Sambungan tabel 1

No	Tujuan Penelitian	Fokus Penelitian
		<i>município</i> , sehingga program berjalan parsial.
4	Menilai kontribusi desentralisasi dan partisipasi warga negara terhadap kualitas layanan publik lokal, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.	- Perubahan kualitas aksesibilitas dan kondisi jalan. - Efektivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan. - Dampak partisipasi warga terhadap akuntabilitas dan transparansi penyediaan layanan jalan.

Dengan adanya Tabel 1, di atas mengenai ruang lingkup dan fokus penelitian dapat dipahami secara sistematis. Penyajian ini diharapkan mampu mempertegas batasan kajian sekaligus menghindari perluasan topik yang tidak relevan, sehingga hasil penelitian lebih terfokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### Batasan Penelitian

Untuk memperjelas ruang kajian, penelitian ini juga dibatasi pada:

1. Lokasi: *Município* Ermera (dengan fokus pada beberapa suco yang menjadi lokasi studi kasus).
2. Sektor layanan publik: terbatas pada infrastruktur jalan, tidak mencakup sektor kesehatan, pendidikan, atau layanan publik lainnya.
3. Objek analisis utama:
  - a. Pemerintah lokal (*Municipal, Administrative post, dan Suco*)
  - b. Warga negara/komunitas lokal
  - c. Mekanisme dan kebijakan desentralisasi terkait pembangunan jalan
4. Pendekatan penelitian: kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga diharapkan memberikan sejumlah manfaat. Manfaat tersebut mencakup kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah baik bagi dunia akademik maupun bagi praktik di lapangan.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akademik di bidang desentralisasi, partisipasi warga negara dan penyediaan layanan publik lokal. Secara khusus, penelitian ini akan:

- a. Memperkaya literatur mengenai implementasi desentralisasi di negara berkembang, khususnya Timor-Leste, yang masih relatif terbatas dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
- b. Memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan antara desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan publik pada sektor infrastruktur jalan di tingkat lokal.
- c. Menawarkan perspektif kontekstual dari wilayah perdesaan pegunungan (kasus *Município* Ermera) yang menghadapi tantangan geografis, sosial, dan institusional, sehingga dapat memperluas kerangka analisis dalam studi tata kelola pemerintah lokal.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*Municipal*): memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat kewenangan lokal dalam penyediaan layanan publik serta meningkatkan efektivitas koordinasi pusat-daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan.
- b. *Presidente Autoridade Municipal* (PAM): sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi implementasi desentralisasi dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- c. Masyarakat lokal: meningkatkan kesadaran dan kapasitas warga dalam berpartisipasi aktif pada seluruh tahapan pembangunan, lebih berkualitas dan berkelanjutan.